

**PENGEMBANGAN UMKM KULINER BERBASIS SYARIAH:
STUDI KASUS DI SUMATERA BARAT**

Nurlaila¹⁾, Yenni Samri Juliati Nasution²⁾, Hendra Hermain³⁾, Purnama Ramadani Silalahi⁴⁾

¹²³⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

E-mail: ¹nurlaila@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the development of sharia-based culinary SMEs from the aspect of products, transactions and information technology in West Sumatra. The researcher used a descriptive approach. The location of this research is in Bukit Tinggi City, Payakumbuh, Batu Sangkar, West Sumatra Province. The object of this research is related to sharia-based SMEs which are reviewed from the aspects of products, transactions and information technology. Researchers conducted FGDs with sharia-based culinary MSMEs, organizational institutions, financial institutions, and governments located in Batu Cage and interviews with culinary MSMEs located in Bukit Tinggi, Payakumbuh, Batu Sangkar. The findings of this study are sharia-based culinary SMEs in West Sumatra can be developed through product aspect development, namely by increasing halal certification administratively, then it can be developed through transaction aspect development, namely by facilitating transactions between buyers and sellers through financial technology and the availability of EDC machines. As well as the development of information technology aspects in order to increase promotion and income through e-commerce and social media.

Keywords : MSMEs, West Sumatra, Products, Transactions and Information Technology

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6822>

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Sumatera Barat terkenal dengan budaya berwiraswasta. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kota-kota dengan ciri khas makanan yang dihasilkan oleh UMKM setempat. Jumlah UMKM di Sumatera Barat tercatat sebanyak 580.344 (Kementerian Keuangan, 2022). Sementara itu, penduduk beragama muslim tercatat sebanyak 5,6 juta jiwa atau sebanyak 97,6%. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengungkapkan pelaku UMKM harus dapat memanfaatkan peluang fasilitasi pemasaran melalui teknologi digital, sehingga pemasaran produk tidak hanya berskala nasional, tapi juga berskala regional dan internasional dengan konsep dari lokal menjadi global. Audy

Joinaldy juga menuturkan pada tahun 2020 jumlah UMKM di Sumatera Barat sebanyak 593.100 unit yang terdiri dari usaha mikro sebanyak 531.350 unit (89.59%), usaha kecil sebanyak 53.431 unit (9.01 %), usaha menengah sebanyak 7.900 unit (1.33 %) dan usaha besar sebanyak 419 unit (0,07 %) (Isran, 2021). Menyikapi sudah lamanya kondisi pandemi ini, salah satu upaya untuk pengembangan kembali sektor UMKM di masa pandemi adalah peningkatan inovasi, kreasi, adaptasi dan keterampilan para pelaku UMKM, bukan saja dengan berjualan maupun melakukan pembayaran secara online, tetapi juga menciptakan produk yang kreatif dan berdaya saing sehingga bisnis bisa terus berkesinambungan (Isran, 2021).

UMKM berbasis syariah dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi produktif rakyat yang berskala mikro, kecil dan menengah yang dikelola secara komersil, dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan serta pada pengelolaannya menggunakan prinsip-prinsip syariah atau dengan kata lain tidak melanggar aturan syariah seperti maisir, gharar dan riba. Seperti pembiayaannya dengan bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah dan penjaminannya dengan asuransi syariah. Riset Nurlasera dan Qomariah L menunjukkan bahwa sebagian pedagang masih belum memahami konsep halal dari LPPOM MUI dengan halal yang dikeluarkan sendiri oleh perusahaan. Dari segi perdagangan, pelaku usaha wajib menjual dan berdagang sesuai dengan syariat, jujur dengan barang yang dijual dan berusaha menggunakan Jasa Bank Syariah (Nurlasera, 2019).

Adanya pandemi Covid 19 menurunkan jumlah UMKM itu sendiri (Arifqi, 2021). Berdasarkan penelitian Lisa Fitriani Rahman dan Shinta Ayudhia menemukan beberapa UMKM tidak mampu mempertahankan usahanya karena UMKM dihadapkan oleh beberapa problematika bisnis baik eksternal maupun internal (Rahman, 2020). Problematika UMKM umumnya berupa permodalan yang kecil, SDM yang belum berpengalaman, pengaturan keuangan yang tidak akuntabel, pemasaran yang terbatas, dan perencanaan usaha yang tidak profesional (Sudiart, 2014). Selanjutnya Penelitian Sinarwati menambahkan bahwa pengetahuan SDM yang terbatas baik dalam hal pencatatan keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, dan manajemen bisnis merupakan masalah-masalah yang sering muncul bagi pelaku UMKM (Sinarwati, 2014).

Masalah yang ditemukan dari segi produk UMKM yang berkecimpung pada Bisnis Kuliner berbasis syariah di Sumatera Barat adalah terkait izin usaha dan label halal yang belum tertera pada kemasan. Kendala ini terjadi karena mayoritas UMKM hanya memproduksi pada usaha kecil-kecilan yang dibuat di dapur keluarga. Sehingga

produksiya masih terbatas dan masih sangat membutuhkan bantuan modal.

Fenomena dilapangan dari sisi transaksi, UMKM di Sumatera Barat masih banyak menggunakan lembaga keuangan konvensional dan daerah seperti Bank Nagari. Hal ini disebabkan belum banyak berdiri bank syariah di daerah-daerah di Sumatera Barat. Keterbatasan mesin ATM hanya ditemukan di Kota Kabupaten wilayah di Sumatera Barat.

Menurut Kepala Balitbang Prov. Sumbar Reti Wafda mengatakan “Nilai budaya kerja yang dimiliki UMKM di Sumatera Barat sangat bagus 4,29 dari skor satu sampai lima, namun resourcefulness, yaitu sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan usaha inovatif masih rendah skornya hanya 2,49” (safir, 2022). Sumber daya tersebut ada sumber daya berwujud seperti persediaan teknologi, keuangan dan sumberdaya yang tak berwujud seperti merek, jaringan bisnis, gudang sosial yang kuat hal ini sebenarnya sangat mendukung UMKM untuk dapat cepat pulih dan berkembang (Hidayat, 2021). Sementara itu, mayoritas UMKM di Sumatera Barat terutama UMKM kuliner didominasi oleh Ibu Rumah tangga yang sulit menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi UMKM Kuliner di Sumatera Barat masih sangat minim terlebih dalam hal pemasaran menggunakan ecommerce.

Menyadari hal tersebut, UMKM di Sumatera Barat perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar dari berbagai pihak. Ditinjau dari potensi yang dimiliki UMKM di Sumatera Barat, UMKM yang berbasis Kuliner merupakan UMKM yang banyak berperan dalam meningkatkan PAD dari dinas Pariwisata sebanyak Rp 105 Miliar dan paling banyak dikenal di Indonesia hal ini dinilai dari adanya Taman Kuliner yang ada di Kota Padang sejak tahun 2016. Serta banyaknya kegiatan-kegiatan festival jajanan Minang dan festival kuliner yang menyajikan makanan khas Minangkabau mulai dari masakan asli legendaris sampai makanan minang peranakan. Hal inilah yang mendasari pentingnya dilakukan penelitian terkait Pengembangan

UMKM Kuliner Berbasis Syariah: Studi Kasus di Sumatera Barat.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Bukit Tinggi, Payakumbuh, Batu Sangkar Provinsi Sumatera Barat. Lokasi penelitian ini merupakan kota-kota yang memiliki ragam UMKM di Sumatera Barat. Adapun Penelitian ini dilaksanakan pada Agustus 2022. Adapun subjek penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang bergerak pada bidang kuliner, praktisi lembaga keuangan syariah dan pembuat kebijakan. Objek penelitian ini adalah terkait UMKM berbasis syariah ditinjau dari aspek produk, transaksi dan teknologi informasi. Sumber data yang terdapat dalam riset ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam riset ini, peneliti akan melakukan wawancara dan FGD yang ditujukan kepada pihak-pihak terlibat dalam konteks riset ini, pertama data diperoleh dari UMKM Syariah yang ada di Provinsi Sumatera Barat yaitu di Bukit Tinggi, Payakumbuh, Batu Sangkar karena mempunyai perkembangan yang sangat pesat dalam menjalankan program UMKM syariah. Dalam riset ini data sekunder berasal dari website resmi yang dimiliki oleh UMKM Indonesia, website OKE OCE Winner Indonesia dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik riset.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku-pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Wawancara dilakukan langsung di: a. Kota Batu Sangkar yaitu kepada pemilik usaha Boemboe Mandhe. b. Kota Payakumbuh yaitu pemilik usaha Pisang Goreng dan Rendang Amay. c. Bukit Tinggi

yakni Nasi Kapau dan Keripik Sanjai Umi Aufa Hakim.

2. Focus Group Discussion (FGD)

FGD merupakan jenis penelitian kualitatif berupa suatu diskusi atau wawancara semi terstruktur dengan topik “Pengembangan UMKM Kuliner Berbasis Syariah: Studi Kasus di Kota Sumatera Barat”. FGD ini dilakukan di Batu Sangkar. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan UMKM kuliner berbasis syariah sejumlah 15 orang dan dihadiri oleh lembaga organisasi, lembaga keuangan dan Pemerintahan sejumlah 7 orang. Pemerintah diwakili oleh dinas perindustrian, pemerintah kabupaten, dan dinas koperasi. Lembaga organisasi UMKM diwakili oleh OKE OCE Winner Indonesia dan Bundo Kandang. Lembaga keuangan diwakili oleh Bank BRI, Bank Nagari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan UMKM Kuliner Berbasis Syariah Di Sumatera Barat Dari Aspek Produk

UMKM Kuliner berbasis syariah di Sumatera Barat memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Hal ini ditemukan saat FGD yang dilakukan. Berdasarkan diskusi FGD yang dilakukan, Beberapa faktor mendasar disebabkan oleh mayoritas penduduk di Sumatera Barat adalah penduduk Muslim, dan mayoritas ibu-ibu rumah tangga yang ada di Sumatera barat merupakan ibu-ibu yang rajin dan kreatif dalam mengelola makanan. Berdasarkan FGD yang telah dilakukan, semua produk UMKM di Sumatera Barat dipastikan proses dan bahan-bahannya halal tetapi secara administrasi belum semua produk yang dikeluarkan memiliki sertifikasi halal. Hal ini disebabkan biaya pengurusan sertifikasi halal di Sumatera Barat sebesar Rp 1,5 juta bagi (setiap) UMKM. Biaya ini harus dikeluarkan secara mandiri oleh UMKM sehingga UMKM merasa biaya ini cukup besar.



Gambar .1

FGD Bersama UMKM, OK Oce dan perwakilan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil diskusi bersama dengan OKE OCE Winnner Indonesia selaku organisasi yang mensupport UMKM di Sumatera Barat terus berkembang menyatakan bahwa organisasi ini sangat focus dan optimis bahwa UMKM di Sumatera Barat dapat berkembang ke kancanasional maupun International. Disamping itu, berdasarkan pengamatan peneliti, produk-produk UMKM sudah layak untuk dipasarkan dan dijadikan buah tangan atau oleh oleh bagi wisatawan yang berkunjung di Sumatera Barat. Ditinjau dari tekstur rasa, UMKM dipandu oleh OKE OCE Winner Indonesia sudah mampu mengembangkan produk yang ada dari segi rasa yang sudah layak untuk dijual dan sudah memiliki banyak varian rasa. Hal ini merupakan bentuk dari kreatifitas dari UMKM kuliner di kota sumatera barat. Tentunya kreatifitas UMKM harus terus berkembang (Ananda, 2017). Selain itu, dari segi daya tahan produk untuk dipasarkan. Produk-produk UMKM yang berada di bawah naungan OKE OCE Winner Indonesia ini pun sudah mampu bertahan lama rentang 30-90 hari. Sehingga Konsumen dapat menikmati makanan tersebut tanpa khawatir akan cepat kadaluarsa.

Sementara itu, perwakilan pemerintah menuturkan saat ini, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan akan terus mendorong sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Sumatera Barat. Pemprov Sumbar juga akan terus mensosialisasikan kepada bupati maupun wali kota di Sumatera Barat terus mendorong sertifikasi halal. Sebab, semua produk harus tersertifikasi halal pada 2024. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menjamin semua produk UMKM di Sumatera Barat dipastikan proses dan bahan-bahannya halal sehingga tugas pemerintah saat ini ialah memaksimalkan regulasi terkait halal, memperbanyak sertifikasi halal dan penguatan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah.

Untuk memperkuat temuan peneliti, peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada pemilik usaha terkait penerapan UMKM kuliner berbasis syariah di Sumatera Barat dari aspek produk. Berdasarkan wawancara kepada Anisa selaku pemilik usaha Boemboe Mandhe menyatakan bahwa usaha Boemboe Mandhe miliknya menjalankan syariat Islam dalam produksinya seperti menjaga kebersihan dapur, menggunakan bahan-bahan yang sehat dan halal. usaha ini telah mampu bersaing dengan usaha lainnya dan menembus pasar mancanegara.



Gambar. 2

Penelitian UMKM Boemboe Mandhe di Batu Sangkar

UMKM Boemboe Mandhe di Batu Sangkar ini sudah mampu menembus pasar International. Hal ini juga merupakan suatu kebanggaan bagi UMKM kita yang terus berkembang. Pemasaran dilakukan menembus pasar Arab Saudi, Inggris dan Australia.

Sementara itu, berdasarkan wawancara kepada Ibu Ina Yatul Kubra selaku pelaku

pedagang rendang menyatakan bahwa “Peluang dari ekspor olahan rendang mengalami kesulitan, yaitu dengan harus adanya izin ekspor dan legalitas sertifikat halal”. Berikut hasil olahan rendang yang diproduksi oleh UMKM berbasis syariah yaitu Ibu Ina Yatul Kubra.



Gambar. 3

Olahan rendang Amaey di Payakumbuh

Gambar diatas menunjukkan berbagai olahan rendang yang tersedia di payakumbuh, olahan rendang ini merupakan bumbu instan yang sudah mendapatkan label halal oleh MUI. Olahan rendang dari UMKM ini menggunakan bahan baku yang diambil dari pelanggan yang sudah memiliki sertifikat halal dan terjamin keamanannya sehingga bahan baku olahan rendang nya dapat dikonsumsi dengan aman, halal dan menyehatkan. Daging yang digunakan juga dipotong ditempat pemotongan daging yang sudah memenuhi syariat Islam yakni disembelih dengan menyebut nama Lafaz Basmallah. Kemasan yang digunakan pada produk UMKM ini juga sudah cukup baik dengan menyajikan logo halal, komposisi dan dilengkapi dengan nomor izin edarnya. Bumbu rendang Amaey ini sudah mampu menembus pasar International dengan pemasaran ke Eropa dan Malaysia. Untuk pemasaran, pemasaran bumbu rendang ini sulit dipasarkan di daerah Sumatera Barat sendiri karena mayoritas penduduk mampu memproduksi bumbu rendang. Sehingga pemasaran lebih banyak dipasarkan kekanca nasional dan kanca International.

Ibu Ina Yatul Kubra menyatakan kondisi pengusaha rendang di Sumatera Barat saat ini ialah:

1. Kondisi owner menyediakan legalitas ekspor masih sangat sulit karena legalitas izin masakan rendang yang didalamnya terdapat daging. Harus memenuhi berbagai kriteria-kriteria khusus.
2. Untuk olahan rendang di dalam negeri masih lancar. Karena banyak warga minang yang merantau di berbagai wilayah di Indonesia dan ketersediaan rempah-rempah di Indonesia masih terpenuhi. Namun demikian, rendang Sumatera Barat dapat juga berbeda-beda ada yang terlalu pedas, ada yang sedikit berair, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna lebih kehitam-hitaman hal ini terjadi dari selera owner yang berbeda-beda dan perbedaan bumbu tergantung daerah.

3. Sumber Daging sapi dari Payakumbuh, Bukittinggi dan Padang Panjang. Sudah memiliki langganan sendiri yang sudah ada sertifikat halalnya dan terjamin keamanannya.
4. Sistem pembayaran dengan sistem transfer baru dikirim produknya hal ini dikarenakan banyak konsumen yang order dulu namun mereka tidak mengambil pesanan rendangnya tepat waktu sehingga makanan tersebut mudah rusak. Sementara itu, dalam mengolah rendang membutuhkan waktu yang lama dalam mengolahnya berkisar 6-8 jam
5. Sementara itu, Jumlah karyawan pada umumnya 3-4 orang namun jika banyak yang memesan bisa sampai 9 orang karyawan. Kondisi ini terjadi biasanya saat lebaran baik Idul Fitri maupun Idul Adha.

Selain itu, peneliti juga mewawancarai pemilik usaha oleh-oleh Ummi Kalsum, dalam wawancara yang dilakukan, pemilik UMKM menjamin kehalalan, kebersihan dan kelayakan jual produk-produknya. Sementara itu, dalam produksinya olahan produk keripik sanjai ini sudah menggunakan mesin namun belum sepenuhnya. Pelaku usaha mengaku bahwa bahan dasar ubi dalam kripik sanjai menggunakan ubi dengan kualitas pilihan dan melalui proses pembersihan terlebih dahulu sebelum diolah. Tepung yang digunakan juga berasal tepung yang sudah bersertifikat halal. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi kehalalannya. Olahan Kripik sanjai ini dapat bertahan dalam rentang waktu yang cukup lama yakni 30-360 hari dan dikemas dengan sangat baik sehingga aman dibawa kemana-mana. Harga yang dipasarkan juga masih sangat terjangkau. Produk kripik sanjai ini sudah terkenal diberbagai wilayah di Indonesia

dengan cita rasanya yang khas dan variannya yang banyak dan unik seperti keripik rasa tomat, labu, bawang dan lain lain. Pemilik mengaku dengan adanya sertifikat halal, produk kripik sanjai ini mudah masuk

keberbagai lini lapisan masyarakat dan dapat memberikan rasa aman bagi konsumen muslim yang mengkonsumsinya. Berikut dokumentasi wawancara kepada Umi Aufa Hakim selaku owner dari produk kripik sanjai.



Gambar 4
Penelitian UMKM Keripik Sanjai Umi Aufa Hakim di Bukit Tinggi

3.2 Penerapan UMKM Kuliner Berbasis Syariah Di Sumatera Barat Dari Aspek Transaksi

Berdasarkan hasil FGD dan wawancara yang dilakukan, Penggunaan transaksi UMKM kuliner berbasis syariah di Sumatera Barat masih di dominasi oleh pembayaran yang dilakukan secara tunai, terlebih untuk UMKM yang berada di daerah. Hal ini disebabkan UMKM yang ada di daerah masih mempertahankan ciri khas ketradisionalannya, sementara itu kurangnya sosialisasi digital terkait pembayaran digital juga masih sangat perlu untuk dilakukan. Karena pelaku UMKM yang mayoritas adalah Ibu rumah tangga, UMKM ini masih melakukan pemasaran yang sederhana dengan pembayaran tunai. Pengetahuan tentang pemasaran produk dengan ecommerce juga perlu ditingkatkan karena temuan di lapangan banyak UMKM yang

belum mengetahui cara memasarkan produknya di ecommerce.

Peneliti menemukan bahwa UMKM yang menggunakan transaksi digital hanya ada di wilayah Bukit Tinggi sementara itu di daerah lain, masih menggunakan transaksi pembayaran cash. Bahkan pembayaran menggunakan *Electronic Data Capture* (EDC) sangat sedikit. Padahal mesin EDC ini dapat sangat membantu UMKM dalam bertransaksi non tunai dengan pelanggan. UMKM dapat menggunakan mesin EDC tidak hanya sebagai alat pembayaran konsumennya. Namun, dipergunakan untuk jasa transfer uang, pengambilan uang, pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, dan lain-lain. Sehingga pelaku UMKM dari risiko pembayaran menggunakan uang palsu, dan memperlancar transaksi pembayaran. Selain itu, dengan adanya mesin EDC kasir juga tidak akan repot mencari uang kembalian., memudahkan

konsumen dalam melakukan pembayaran dalam jumlah banyak, serta menghemat waktu antara penjual dan pembeli. EDC juga akan sangat memudahkan pelanggan karena pelanggan hanya menggesek kartu atm debit maupun kredit miliknya untuk dapat bertransaksi.

Tidak hanya minimnya ketersediaan mesin EDC, peneliti juga menemukan bahwa pembayaran menggunakan QRIS juga masih minim digunakan oleh UMKM padahal ini sangat membantu UMKM dan pelanggan untuk bertransaksi lebih mudah, cepat dan aman. Berdasarkan penelitian Batubara (2022) bahwa

penggunaan Qris sangat berdampak pada kepuasan konsumen sebagai alat transaksi (Batubara, 2022).

Peneliti cukup sulit menemukan pembayaran melalui transaksi non tunai dan secara syariah. Pembayaran melalui system non tunai dan syariah hanya ditemukan dilokasi-lokasi tertentu yang mana kawasan tersebut merupakan lokasi yang bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Namun demikian peneliti terus mencari UMKM yang memiliki system transaksi non tunai dan syariah di nasi Kapau Nier. Berikut dokumentasi UMKM yang sudah menggunakan transaksi syariah.



Gambar 5

UMKM Nasi Kapau di Bukit Tinggi

Penerapan UMKM kuliner berbasis syariah di Sumatera Barat dari aspek transaksi belum sepenuhnya menggunakan transaksi melalui lembaga keuangan syariah. Pengetahuan UMKM terkait riba masih mendasar sehingga UMKM yang mayoritasnya muslim masih menggunakan lembaga keuangan konvensional dalam permodalan dan transaksinya. Lembaga keuangan yang justru banyak membuka cabang di Sumatera Barat adalah Bank Nagari. Meskipun begitu, perbankan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) saat ini terus bergerak dan bersinergi dengan UMKM dalam memberikan pembiayaan dan memberikan layanan transaksi yang memudahkan pelaku UMKM dan masyarakat dalam bertransaksi.

Kendala belum beroperasinya lembaga keuangan syariah di Sumatera Barat sendiri disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang menganggap akses ke lembaga keuangan syariah cukup sulit, hal ini juga disebabkan oleh factor jaminan yang dipersyaratkan lembaga keuangan dan prosedur yang lama dan sulit. Dalam hal ini UMKM belum memenuhi syarat untuk memasuki lembaga keuangan syariah karena omset yang dihasilkan sangat kecil dan belum adanya pembukuan transaksi yang akuntabilitas yang memenuhi syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Poin ini menjadi sangat penting bagi lembaga keuangan menilai kelayakan usaha pelaku UMKM, Karena lembaga keuangan syariah

juga meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah kedepannya (Silalahi, 2022).

3.3 Penerapan UMKM Kuliner Berbasis Syariah Di Sumatera Barat Dari Aspek Penggunaan Teknologi Informasi

Pelaku UMKM kuliner berbasis syariah di Sumatera Barat didominasi oleh kaum ibu-ibu rumah tangga yang menjalankan usaha binisnya di dapur rumah mereka. Penggunaan teknologi dalam bisnis yang dilakukan oleh UMKM bisnis kuliner syariah di Sumatera Barat ini cenderung masih menggunakan alat-alat tradisional dan peralatan dapur. Sementara itu, penggunaan teknologi dalam rangka mempercepat pemasaran produk, berdasarkan FGD dan wawancara yang peneliti lakukan, pelaku UMKM ini hanya sebagian yang menggunakan ecommerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Bli-Bli, Gojek, Grab dan sebagainya sebagai media dalam pemasaran produknya. Adapun UMKM kuliner yang sudah menerapkannya yakni kripik sanjai UMMI Aufa Hakim yang sudah memasarkan produknya di Tokopedia, shopee, dan Bukalapak. UMKM Boemboe Mandhe da Rendang Amaey juga sudah memasarkan produknya di Shopee, Tokopedia dan bukalapak. Sementara itu, UMKM ini juga sudah memiliki instagram bisnis dan facebook bisnis untuk memasarkan produknya. Kecenderungan UMKM hanya memasarkan produknya dengan metode sederhana yakni mouth to mouth. Namun sebagian UMKM sudah memasarkan produknya menggunakan media sosial pribadi miliknya seperti facebook, instagram dan whatsapp pribadi. Temuan lapangan, intensitas pemanfaatan teknologi yang digunakan UMKM kuliner berbasis syariah belum intense, frekuensi pemanfaatannya juga belum maksimal. Peneliti juga sangat jarang menemukan gojek atau grab di wilayah batu sangkar dan payakumbuh. Peneliti hanya menemukan grab dan gojek di daerah bukit tinggi. Padahal ketersediaan Gojek dan Grab turut dapat membantu pemasaran produk dan mengembangkan penjualan UMKM kuliner. Hal ini merupakan

bagian dari digital marketing. Sebagaimana penelitian Nasution (2022) dan Hafizh (2022) bahwa digital marketing sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan UMKM kuliner.

4. KESIMPULAN

Sumatera Barat dapat dikategorikan sebagai “Kota Religi”. Masyarakat masih mempertahankan kultur kedaerahan dan petuah “adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah”. Maknanya menjunjung adat dan nilai keagamaan. Masyarakat juga tidak mengkhawatirkan kehalalan produk dari para UMKM namun dari segi administrasinya, UMKM kuliner berbasis syariah masih sangat membutuhkan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI sehingga produknya dapat bersaing bebas kedaerah lain. Walaupun “Kota Religi” lembaga syariah belum berjalan baik di Sumatera Barat hal ini ditinjau dari permodalan dari lembaga keuangan syariah masih kurang sosialisasi. Keterbatasan perbankan syariah masih sangat terasa di Provinsi Sumatera Barat. Transaksi pembayaran yang dilakukan UMKM juga masih menggunakan pembayaran secara tunai. penggunaan teknologi masih rendah karena kurangnya pengetahuan UMKM memasarkan produknya melalui ecommerce, sosial media dan platform-platform digital lainnya. Pemasaran produk masih menggunakan cara-cara yang tradisional

Adapun masukkan maupun saran yang dapat peneliti berikan untuk menunjang pengembangan UMKM kuliner berbasis syariah: studi kasus di Sumatera Barat ialah UMKM Kuliner Berbasis Syariah diharapkan dapat menjaga kepercayaan pembeli serta meningkatkan pengetahuannya terkait pemanfaatan teknologi dalam menunjang penjualan dan jangkauan pemasaran yang lebih luas lagi, melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah baik permodalan, transaksi dan sebagainya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih peneliti ucapkan kepada pimpinan Rektor UIN Sumatera Utara dan

jajarannya, Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Jajarannya serta pihak-pihak yang membantu dalam kelancaran proses penelitian ini hingga akhir. Semoga mendapatkan kebaikan oleh Allah SWT.

6. REFERENSI

- Ananda, Amin Dwi. 2017. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 1, No 1
- Arifqi, Moh. Musfiq, (2021), Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol 3 No 2 .
- Batubara, Tryana Ramadhany, Purnama Ramadani Silalahi dan Khairina Tambunan. 2022. Dampak Penggunaan QRIS Terhadap Kepuasan Konsumen Sebagai Alat Transaksi. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisplin*, vol. 2. No 1
- Firdaus, Fahmi, M. Walidur Rif'ih dan Bunga Maharani, Internet Financial Reporting: Ditektor Eskalasi Pembiayaan Modal UMKM Berbasis Stakeholder Value Sebagai Implementasi Financial Technology, *Prosiding 4th Seminar Nasional dan Call for Paper*, 2018
- Hafizh, Muhammad dan Purnama Ramadani Silalahi. 2022. The Influence of Digital Marketing On Sharia MSME Income (Study of Sharia MSMEs in Deli Serdang Regency), *El-Amwal*, vol 5, No 2.
- Hidayat , I. P, Hadiyanti , L, Sukmawati, R., Nurashiah, S & Suhaemi, B. (2021), Optimalisasi Ekonomi Kreatif Di Masa Pandemi bersama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rancage Desa Curugrendeng, *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(20).
- Hidayat, M Syamsul, Toto Heru Dwihandoko, Eny Sutyarningsih, (2022), Pembinaan Administrasi Keuangan Dan Pemasaran Digital Pada UMKM Karunia Desa Sawahan Mojokerto, Abdimas Nusantara: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 3 No 2.
- Kementerian Keuangan. 2022. *Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Barata Tahun 2021*, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat.
- Lisa Fitriani Rahman dan Shinta Ayudhia. 2020. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM di Kota Padang, *Jurnal Profiet*, Vol 4, No 1
- Nasution, Salman dan Purnama Ramadani Silalahi. 2022. Peran Digital Marketing dalam meningkatkan Pendapatan UMKM Kuliner Berbasis Syariah di Kota Medan, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal EKonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 7 No 2
- Ni Kadek Sinarwati, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belum Diterapkannya Pencatatan Keuangan Berbasis Etap Di UMKM (Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Buleleng).
- Nurlasera dan Qomariah L. 2014. Peluang dan Tantangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Syariah Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di kota Pekanbaru, *Jurnal Al-Iqtishad*, Edisi 15, Vol I, 2019.
- Putu Lanang Eka Sudiart, Kriya Ketut & Cipta Wayan. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil, dan Menengah

(UMKM) Di Kab. Bangle. Vol 2.
Universitas Pendidikan Ganesha.

Pujiyono, Arif., Ro'fah Setyowati dan Idris,
Strategi Pengembangan UMKM Halal di
Jawa Tengah Dalam Menghadapi
Persaingan Global, *Indonesian Journal of
Halal*, 2018

Silalahi, Purnama Ramadani dkk. 2022.
Eektivitas Penerapan Islamic
Mikrofinance Melalui Pembiayaan Mikro
Dalam Mengembangkan Usaha Dan
Peningkatan Pendapatan Nasabah
UMKM (Studi kasus Pada Bank Syariah
Di Kota Medan), *JIKEM: Jurnal Ilmu
Komputer, ekonomi dan Manajemen*, Vol
2 No,1.

Website:

Safitri, Algamar Arif. (2022). Wagub Sumbar:
Pelaku UMKM Harus Go Digital Untuk
Menghadapi Tantangan Global, dalam
Portal Resmi www.sumbarprov.go.id,
diposting pada 16 Juli

Isran, UMKM Sumatera Utara Dituntut Kuasai
Pasar Digital, dalam website
www.scientia diposting pada November
2021.